



LAPORAN KINERJA (LKJ) DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN



2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja tahun 2024 Dinas Perdagangan Kota Madiun telah dapat diselesaikan penyusunannya. Laporan kinerja ini merupakan salah satu upaya menuju penerapan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang lebih baik.

Laporan Kinerja tahun 2024 yang kami susun ini merupakan bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas, dan sebagai acuan guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 ini juga merupakan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam naungan Dinas Perdagangan Kota Madiun, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari kata sempurna, maka masukan dan saran masih sangat kami butuhkan untuk lebih meningkatkan Laporan ini baik dalam penyajian ataupun substansinya, agar diperoleh hasil yang lebih baik ditahun-tahun mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Madiun, 7 Maret 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN**



DAFTAR ISI

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Dinas Perdagangan Kota Madiun

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LKJ.....	5
1.4. GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN	5
1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN	10
1.6. PERMASALAHAN.....	11
1.7. ISU STRATEGIS.....	12
1.8. ISU GENDER	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. RENCANA STRATEGIS	18
2.1.1. Tujuan	18
2.1.2. Sasaran	19
2.2. RENCANA KINERJA.....	21
2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	21
2.2.2 Program.....	22
2.2.3 Kegiatan	23
2.2.4 Sub Kegiatan	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
B. REALISASI ANGGARAN	54
BAB IV PENUTUP	61
A. SARAN	61
B. KESIMPULAN.....	61
C. UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kepegawaian.....	9
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai sesuai Golongan Ruang / Pangkat.....	10
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai sesuai Eselon	10
Tabel 1.6 Matrik Gender Analysis Pothway (GAP) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	14
Tabel 1.7 Matrik Gender Analysis Pothway (GAP) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	16
Tabel 2.1 Matriks Dokumen Perencanaan.....	21
Tabel 3.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	28
Tabel 3.2 Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) s.d Triwulan IV Tahun 2024.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas	8
Gambar 3.1 Grafik Time Series PDRB.....	31
Gambar 3.2 Grafik Volume Perdagangan.....	38
Gambar 3.3 Data Terpilah Gender Pada Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2024.....	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan Kota Madiun menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terdapat empat indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Madiun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2019-2024 serta program prioritas Pemerintah Kota Madiun yang lainnya. Adapun pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan dalam kategori diatas espektasi karena memiliki nilai kinerja diatas 100 persen. Jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp. 16.855.913.628,- dengan penyerapan sebesar Rp. 16.237.998.426,91 atau 96,33 persen. Anggaran tersebut terdiri atas anggaran rutin sebesar Rp. 10.264.246.844 dengan penyerapan sebesar Rp. 9.768.876.778,- atau 95,17 persen dan anggaran bidang sebesar Rp.6.591.666.784,- dengan penyerapan sebesar Rp. 6.469.121.648,91 atau 98,14 persen.

Tujuan	: Meningkatnya peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	
Indikator	: Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	
Target	: 24,05%	Realisasi : 26,37% Capaian : 109,64%

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
Indikator : Indeks Pelayanan Publik		
Target : 3,96 indeks	Realisasi : 4,5 indeks	Capaian : 113,6%

Sasaran : Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
Indikator : Persentase Kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan		
Target : 100%	Realisasi : 100%	Capaian : 100%

Sasaran	: Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	
Indikator	: Persentase Pasar Rakyat yang berfungsi dengan baik	
Target	100%	Realisasi : 100% Capaian : 100%

Sasaran	: Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	
Indikator	: Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	
Target	4,23%	Realisasi : 4,36% Capaian : 103,07%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya.

Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah Kota Madiun bersama DPRD kota Madiun telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun. Penetapan Perda tersebut yang sekaligus mencabut Perda Nomor 04 tahun 2008 membawa konsekuensi berupa perubahan besar pada susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Madiun, termasuk dilingkungan OPD Kota Madiun.

Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah/Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun, pada tanggal 01 Januari 2021 terdapat perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dibentuklah Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Madiun dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 Tentang tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.10.3/8935/SJ Tentang Tata cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LKJ

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan amanah, yang merupakan bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, dan sebagai acuan guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini juga merupakan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan infomasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun secara rinci adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tugas Pokok

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan

kegiatan dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

1.4.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan perundang-undangan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan perdagangan Pasar Rakyat ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

1.4.3. Struktur Organisasi

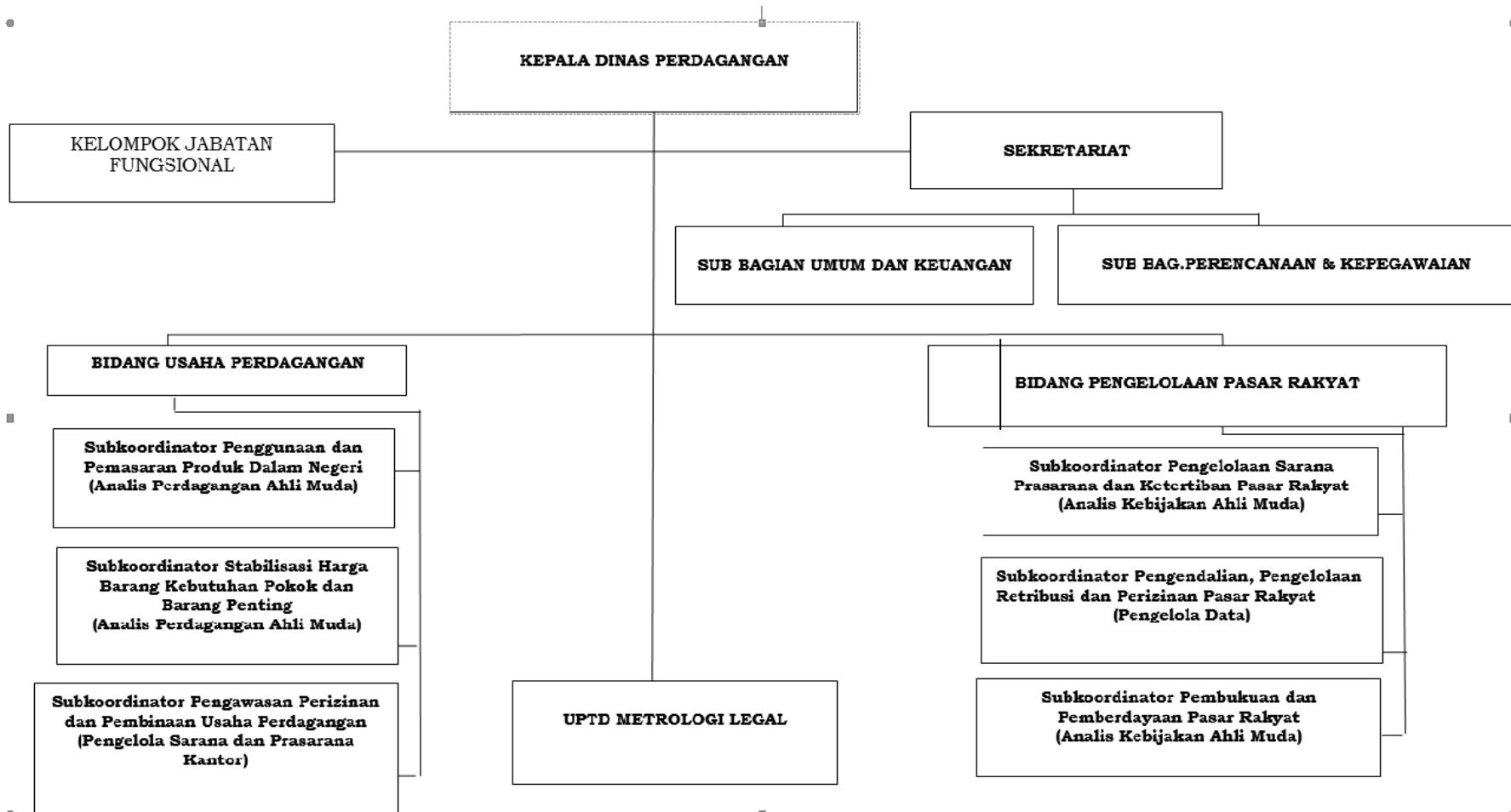
Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Usaha Perdagangan, membawahi :
 - Sub Koordinator Pengawasan Perizinan dan Pembinaan Usaha Perdagangan ;
 - Sub Koordinator Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
 - Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ;
- d. Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat, membawahi :
 - Sub Koordinator Pengendalian, Pengelolaan Retribusi dan Perizinan Pasar Rakyat
 - Sub Koordinator Pengelolaan Sarana Prasarana dan Ketertiban;

- Sub Koordinator Pembukuan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat ;
- e. UPTD Metrologi :
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi pada Dinas Perdagangan Kota Madiun dapat dilihat dalam lampiran berikut ini.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas
Perdagangan Kota Madiun Tahun 2024



1.4.4. SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi tidak dapat dipandang dengan sebelah mata, mereka mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan apa yang menjadi visi, misi dan sasaran yang ada pada Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perdagangan Kota Madiun keadaan akhir tahun 2024 sejumlah 63 (enam puluh tiga) orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	62 orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	- orang
3.	Tenaga Kontrak	1 orang
	Jumlah	63 orang

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	56 orang
2.	Wanita	7 orang
	Jumlah	63 orang

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	4 orang
2.	Sarjana (S1)	13 orang
3.	Diploma III (D3)	4 orang
4.	SLTA	30 orang
5.	SLTP	8 orang
6.	SD	4 orang
	Jumlah	63 orang

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai sesuai Golongan Ruang / Pangkat

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6 orang
2.	Golongan III	29 orang
3.	Golongan II	27 orang
4.	Tenaga Kontrak	1 orang
	Jumlah	63 orang

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai sesuai Eselon

No	Eselonering	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	3 orang
3.	Eselon IV	2 orang
4.	Fungsional	8 orang
5.	Staf	48 orang
6.	Tenaga Kontrak	1 orang
	Jumlah	63 orang

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Kota Madiun disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Madiun dan Isu – Isu Strategis

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini memuat informasi tentang rencana strategis, misi, visi, tujuan, sasaran indikator kinerja sasaran, indikator kinerja utama serta perjanjian kinerja Tahun 2024

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja,

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi yang akan dilaporkan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah
2. Matriks Renstra Perangkat Daerah
3. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024
4. Penetapan target 2025 berdasarkan realisasi 2024
5. Perjanjian Kinerja kepala perangkat daerah tahun 2025
6. Inovasi
7. Capaian Kinerja Perangkat daerah s/d Triwulan IV Tahun 2024

1.6. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi penyebab belum terwujudnya kondisi pelayanan bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat yang diharapkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya revitalisasi pasar rakyat;
2. Belum optimalnya penerimaan PAD yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun yaitu retribusi pengelolaan pasar rakyat dan retribusi tera dan/ atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).

3. Belum adanya jaminan ketersediaan barang pokok tertentu dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau;
4. Kurang maksimalnya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
5. Belum terwujudnya pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur;
6. Belum terbangunnya sistem penyelenggaraan perdagangan serta belum optimalnya informasi jumlah dan volume usaha perdagangan;

1.7. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berkaitan dengan masalah perdagangan di Kota Madiun pada saat ini adalah :

1. Penguatan Sistem Perdagangan.

Penguatan sistem perdagangan diharapkan mampu menciptakan iklim atau sistem perdagangan yang berjalan dengan baik melalui pembuatan regulasi-regulasi bidang pengelolaan perdagangan yang sistematis, peningkatan promosi perdagangan, penataan PKL dan pedagang serta peningkatan peran masyarakat dalam sektor perdagangan untuk peningkatan volume usaha perdagangan melalui pelatihan-pelatihan.

Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

2. Penguatan Kualitas Sarana dan Prasarana.

Kualitas sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna menunjang peningkatan perdagangan. Pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Madiun harus terbebas dari kesan kumuh, kotor dan becek. Dengan perbaikan kualitas sarana prasarana 17 Pasar yang ada ini di harapkan mampu bersaing dengan menjamurnya pasar-pasar modern yang ada dan dapat meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan sektor informal.

3. Optimalisasi Pembangunan Sistem Teknologi Perdagangan dan Teknologi Pengelolaan Pasar Rakyat.

Era digitalisasi harus diikuti secara positif. Oleh karena itu Teknologi harus dioptimalkan sebaik mungkin untuk membangun dan mengembangkan Sistem Teknologi Perdagangan dan Teknologi Pengelolaan Pasar Rakyat. Diantaranya adalah teknologi E-Retribusi yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun sebagai sistem pembayaran retribusi secara non tunai.

4. Optimalisasi Fungsi Tera Ulang di Daerah dan Pasar Rakyat.

Optimalisasi Tera dan Tera Ulang menjadi sangat penting untuk menunjang peningkatan sistem perdagangan yang mewujudkan pembangunan ekonomi berdaya saing dan diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar dan perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

1.8. ISU GENDER

Dalam era modern ini setiap program kegiatan selalu dikaitkan dengan isu-isu gender. Dalam setiap sasaran Dinas Perdagangan selalu dikaitkan dengan pengarusutamaan gender. Diantara dapat dilihat isu gender yang ada pada Dinas Perdagangan adalah pada pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Pembinaan seluruh tenaga upahan yang bertugas sebagai tenaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan petugas pengawas Listrik di 17 pasar yang ada di Kota Madiun sebagai berikut :

Tabel 1.6
Matrik Gender Analysis Pothway (GAP)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBIJAKAN/ PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAwasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE LINE)	INDIKATOR KINERJA
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan : Meningkatkanya volume usaha perdagangan Program: Perizinan dan pendaftaran perusahaan Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Swalayan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PKL atau pelaku usaha yang dibina Jumlah rekomendasi perijinan yang dikeluarkan Jumlah panitia kegiatan sebanyak : 10 orang, terdiri dari 5 orang perempuan dan 5 orang laki-laki Pembinaan PKL sebanyak dilaksanakan sebanyak 3 kali Data jumlah PKL yang mengikuti pembinaan sebanyak: 100 Orang terdiri dari 37 orang perempuan (37%) dan 63 orang laki-laki (63%) 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor akses : Jumlah PKL yang ada lebih banyak laki – laki dari pada perempuan. Partisipasi : Tingkat partisipasi peserta pada pembinaan PKL Kota Madiun pada umumnya lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Kontrol: Faktor pengelola Pembinaan PKL Kota Madiun pada umumnya lebih banyak laki-laki Manfaat : Penerima manfaat pembinaan PKL adalah masyarakat umum utamanya Pedagang Kaki 	<p>Kurangnya pembinaan dan kurangnya jumlah petugas sehingga menyebabkan belum optimalnya pembinaan PKL di Kota Madiun</p>	<ul style="list-style-type: none"> Semakin menjamurnya PKL yang ada di Kota Madiun Kurangnya kesadaran PKL dalam mewujudkan tempat berusaha yang bersih dan nyaman 	<p>Meningkatkan perizinan pelaku usaha dan kegiatan berusaha bagi PKL Kota Madiun yang lebih responsive Gender.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Persiapan dan perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Penyusunan Laporan kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pembinaan kepada PKL Kota Madiun sebanyak 3 kali Jumlah panitia kegiatan sebanyak : 10 orang, terdiri dari 5 orang perempuan dan 5 orang laki-laki Data jumlah PKL yang mengikuti pembinaan sebanyak: 100 Orang terdiri dari 37 orang perempuan (37%) dan 63 orang laki-laki (63%) 	<ul style="list-style-type: none"> Output : Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Outcome : Meningkatnya pertumbuhan volume usaha perdagangan

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBIJAKAN/ PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE LINE)	INDIKATOR KINERJA
<ul style="list-style-type: none"> Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tujuan: Meningkatnya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Sasaran : Terwujudnya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 		Lima yang ada di Kota Madiun.						

Tabel 1.7
Matrik Gender Analysis Pothway (GAP)
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

LANGKAH 1 NAMA KEBIJAKAN/ PROGRAM / KEGIATAN	LANGKAH 2 DATA PEMBUKA WAWASAN	LANGKAH 3 ISU GENDER	LANGKAH 4 FAKTOR KESENJANGAN	LANGKAH 5 SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	LANGKAH 6 KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	LANGKAH 7 REFORMULASI TUJUAN	LANGKAH 8 RENCANA AKSI	LANGKAH 9 BASIS DATA (BASE LINE)	INDIKATOR KINERJA
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan: Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat Program: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar di Kota Madiun yang dikelola oleh Dinas Perdagangan sebanyak 17 Pasar Jumlah Seluruh Tenaga upahan yang bertugas sebagai petugas keamanan dan ketertiban, Petugas Kebersihan dan petugas Pengawasan Listrik dari 17 Pasar sebanyak 116 orang terdiri dari : Seluruh tenaga upahan yang 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor akses : Jumlah yang datang ke pasar lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Partisipasi : <ul style="list-style-type: none"> Tingkat Partisipasi pengunjung Pasar pada umumnya lebih banyak perempuan. Tingkat partisipasi sebagai petugas Keamanan dan Ketertiban, Petugas Kebersihan dan Petugas Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya jumlah petugas sehingga menyebabkan kurang optimalnya Pengelolaan pelayanan Pasar rakyat. 	<ul style="list-style-type: none"> Timbulnya Pasar Modern dan minimarket serta Waralaba. Antusias masyarakat untuk berkunjung atau berbelanja kepasar tradisional masih kurang, karena masyarakat beranggapan bahwa belanja dipasar tradisional kurang bersih dan kurang nyaman Banyaknya pedagang sayur keliling di setiap wilayah sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk datang dan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah pengunjung pasar tradisional yang lebih responsif Gender Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban, kebersihan dan pengawasan listrik pasar-pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan yang lebih responsif Gender 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Persiapan dan perencanaan Pelaksanaan Kegiatan sarana Distribusi Perdagangan Penyusunan Jadwal dan pembentukan anggota pelaksanaan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan pengawasan listrik pasar-pasar Pelaksanaan keamanan dan ketertiban, kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar Rakyat di Kota Madiun yang dikelola oleh Dinas Perdagangan sebanyak 17 Pasar Jumlah Seluruh Tenaga upahan yang bertugas sebagai petugas keamanan dan ketertiban, Petugas Kebersihan dan petugas Pengawasan Listrik dari 17 Pasar sebanyak 116 orang Terdiri dari 3 	<ul style="list-style-type: none"> Output : Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan Outcome : Terwujudnya Pasar Rakyat yang berfungsi dengan baik 	

<p>Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tujuan: Meningkatkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan berupa keamanan dan ketertiban, kebersihan dan pengawasan listrik pasar-pasar yang dikelola Dinas Perdagangan Sasaran : Petugas Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan dan pengawasan listrik pasar-pasar yang dikelola Dinas Perdagangan 	<p>bertugas sebagai petugas Keamanan dan Ketertiban, Petugas Kebersihan dan Petugas Pengawasan Listrik dari 17 pasar sebanyak 116 orang Terdiri dari 3 orang perempuan (2,5%) dan 113 orang laki-laki (97,5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah panitia kegiatan sebanyak : 10 orang, terdiri dari 4 orang perempuan dan 6 orang laki-laki 	<p>Listrik dari 17 pasar banyak laki-laki.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrol: Pengelola pasar dominan banyak laki-laki Manfaat : Manfaat dari kegiatan ini yaitu terciptanya kebersihan, keamanan dan ketertiban bagi seluruh pengguna pasar baik laki-laki maupun perempuan. 		<p>berbelanja langsung ke pasar tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> Banyaknya pedagang ojokan yang semakin turun ke jalan disekitar pasar Tertanamnya dalam pikiran masyarakat bahwa petugas keamanan dan ketertiban, petugas kebersihan dan petugas pengawasan listrik adalah laki-laki. 		<ul style="list-style-type: none"> dan pengawasan listrik pasar-pasar Penyusunan Laporan kegiatan pengawasan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan pengawasan listrik pasar-pasar Jumlah panitia kegiatan sebanyak : 10 orang, terdiri dari 4 orang perempuan dan 6 orang laki-laki 	
---	---	--	--	--	--	--	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Tujuan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Madiun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang telah dirumuskan, yaitu merupakan keadaan dari hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang perdagangan dan bidang pengelolaan pasar rakyat mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat.

Dinas Perdagangan Kota Madiun telah menetapkan **Tujuan** organisasi yaitu : **"Meningkatkan Peran Perdagangan terhadap Perekonomian Daerah"**.

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

RPJMD periode 2019-2024	Renstra Dinas Perdagangan Periode 2019-2024
Visi : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA	
Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	

<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat 2. Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Peran Perdagangan terhadap Perekonomian Daerah
--	--

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan kelompok berkepentingan (stakeholders) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Dinas Perdagangan Kota Madiun yang ingin dicapai ada 4 (empat). Yang pertama yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik", Dengan meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik maka diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah semakin baik. Sasaran kedua yaitu "Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan. Sedangkan dengan peningkatan volume usaha perdagangan yang meliputi perdagangan usaha kecil menengah seperti perdagangan eceran bukan mobil dan motor diharapkan terjadi peningkatan sirkulasi perputaran uang/modal perdagangan yang beredar di Kota Madiun dapat meningkatkan pendapatan domestic regional bruto yang ada di Kota Madiun. Sasaran ketiga yaitu "Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat ", dengan meningkatnya pendapatan retribusi pasar rakyat diharapkan dapat mendukung peningkatan PAD Daerah yang akan meningkatkan belanja barang/jasa pada UKM Lokal sehingga dapat meningkatkan perputaran uang di Kota Madiun. Sasaran Keempat yaitu "Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen", diharapkan dengan tertib ukur dan timbangan yang pas melalui tera, tera ulang akan dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen sehingga konsumen nyaman berbelanja dan meningkatkan aktivitas jual beli di Kota Madiun.

RPJMD periode 2019-2024	Renstra Dinas Perdagangan periode 2019-2024
<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. 2. Meningkatnya volume usaha perdagangan 3. Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat 4. Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen

Rencana Strategi Dinas Perdagangan Kota Madiun merupakan suatu proses yang dipersiapkan dengan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran selama kurun waktu berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dari berbagai program kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang. Rencana dimaksud dituangkan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Madiun tahun 2019 – 2024.

Dalam rangka penyesuaian strategi penyelesaian isu strategis dan permasalahan serta kebijakan pemerintah daerah maupun pusat serta adanya Pendampingan AKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 oleh Kementerian PAN RB tanggal 21 sampai dengan 22 Juni 2023 di Kota Madiun terdapat perubahan indikator pada sasaran Dinas Perdagangan. Ada empat fokus evaluasi SAKIP 2023. Pertama, efektifitas penggunaan APBN/APBD yang dilakukan instansi pemerintah. Fokus kedua, penjenjangan kinerja untuk memastikan setiap unit kerja dan individu memiliki kinerja dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, ketiga dan keempat adalah memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan evaluasi internal. Adanya rekomendasi dari pendampingan Menpan terdapat perubahan pada dokumen perencanaan untuk lebih menajamkan sasaran organisasi perangkat daerah yang berbasis pada outcome.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan kebijakan sehingga indikator sasaran untuk Nilai reformasi Birokrasi diganti dengan Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan Berita Acara Perubahan Perencanaan. Sedangkan pada tahun 2024 sasaran ini disesuaikan dan lebih ditajamkan dengan sasaran yang langsung menyentuh kepada Masyarakat yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Melalui indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan alat ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. IPP digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sasaran ini lebih dapat langsung dirasakan oleh Masyarakat.

Berikut adalah tabel sasaran sebelum penyesuaian/perubahan dan sasaran sesudah penyesuaian/perubahan.

Tabel 2.1
Matriks Dokumen Perencanaan

NO.	SEBELUM PENYESUAIAN			SESUDAH PENYESUAIAN		
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	80,01%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,96 indeks
2	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Produk yang aman takaran dan timbangannya	100%	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Persentase pasar yang berfungsi dengan baik	100%	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Persentase pasar yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	4,23%	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	4,23%

2.2. RENCANA KINERJA

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Perdagangan memiliki 4 (empat) sasaran dan indikator kinerja. Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun dapat dijelaskan pada table berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,96 indeks
2	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	4,23%
3	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Persentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	100%

2.2.2 Program

Untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan Walikota Madiun Tahun 2023, didukung oleh 6 (enam) program dengan pagu anggaran sebagai berikut :

	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.264.246.844,00
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 86.160.400,00
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 5.643.298.691,00
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 300.254.200,00
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 224.674.843,00
6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 337.278.650,00
	TOTAL	Rp. 16.855.913.628,00

2.2.3 Kegiatan

Untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) dan 6 (enam) Program di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dengan Walikota Madiun Tahun 2024, didukung oleh 14 (empat belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 129.036.500,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.652.173.876,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 125.824.200,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 249.696.266,00
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 65.986.550,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 726.468.958,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 315.060.494,00
8.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp. 86.160.400,00
9.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.307.139.091,00
10.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp. 4.336.159.600,00
11.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 279.621.200,00
12.	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 20.633.000,00
13.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp. 224.674.843,00
14.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp. 337.278.650,00
TOTAL		Rp. 16.855.913.628,00

2.2.4 Sub Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 129.036.500,00
2.	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.652.173.876,00
3.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 125.824.200,00
4.	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 249.696.266,00
5.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 40.661.550,00
6.	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Rp. 25.325.000,00
7.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 726.468.958,00
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 277.780.606,00
9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 27.045.688,00
10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 60.234.200,00
11.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 86.160.400,00
12.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 492.513.313,00
13.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 814.625.778,00
14.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 258.922.000,00
15.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 4.077.237.600,00
16.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 111.443.600,00
17.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Rp. 168.177.600,00
18.	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp. 20.633.000,00

19.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.	217.342.843,00
20.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp.	7.332.000,00
21.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	337.278.650,00
TOTAL		Rp.	16.855.913.628,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Dinas Perdagangan Kota Madiun selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kota Madiun melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Replublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja sasara dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020 – 2024 maupun Rencana Kerja Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I dan Bab II berkaitan dengan capaian kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Madiun, maka pada Bab III ini akan diuraikan 3 aspek penting dalam pengukuran dan akuntabilitas kinerja, yaitu Pengukuran Kinerja, Analisa capaian kinerja dan Akuntabilitas keuangan, yang secara rinci akan diuraikan satu persatu pada Bab III ini.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun sepanjang Tahun 2021–2024, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu serta beberapa Tahun terakhir.
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan 2019-2024.
4. Dibandingkan dengan capaian Nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah membandingkan realisasi dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran realisasi kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah nilai akuntabilitas kinerja bernilai A. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun tahun 2024, laporan ini digunakan untuk mengetahui nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun selama 2024

2. Laporan Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan IV, laporan dimaksud digunakan untuk mendapatkan data capaian kinerja dan jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan program yang menghasilkan capaian kinerja.

A.1. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	70% - 100%	Baik
2	60 % - 69%	Cukup
3	31% - 59%	Kurang
4	0% - 30%	Sangat Kurang

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian Tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

- (1) **Tingkat Realisasi Positif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

(2) **Tingkat Realisasi Negatif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A.2. Analisis terhadap capaian kinerja

Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan perjanjian Kinerja Dinas

Perdagangan adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Percentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	24,05	26,37	109,64%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,96	4,5	113,6%
2	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Percentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	4,23%	4,36%	103,07%
3	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Percentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Percentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	100%	100%	100%

Berikut ini akan disajikan pernyataan Kinerja Sasaran Strategis beserta analisis Capaian Kinerja dari tabel diatas :

A. 2.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

TUJUAN :

” Meningkatkan Peran Perdagangan Terhadap Perekonomian Daerah”

Dalam berbagai perekonomian di seluruh dunia, sektor perdagangan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama terhadap PDRB, baik di tingkat nasional maupun daerah. PDRB sendiri merupakan indikator penting yang menunjukkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Oleh karena itu perkembangan perdagangan di suatu daerah menjadi sangat penting untuk tujuan mengukur berkembangnya perekonomian di suatu wilayah.

Capaian dari tujuan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA 2024
1.	Meningkatkan Peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	24,05	26,37	109,64 %

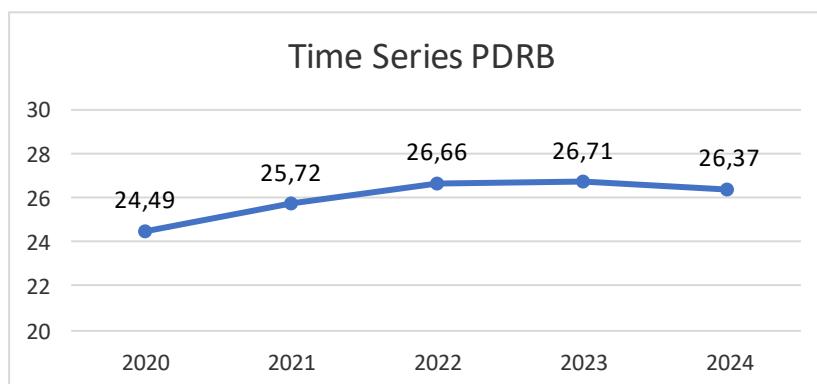
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Capaian indikator dari tujuan untuk nilai kontribusi PDRB perdagangan terhadap total PDRB adalah 26,37 dengan target sebesar 24,05 pada tahun 2024 yaitu dengan capaian 109,64%.

A.2.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	Meningkatkan Peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	24,49	25,72	26,66	26,71	26,37

Perbandingan realisasi kinerja dengan indikator "Meningkatkan Peran Perdagangan Terhadap Perekonomian Daerah." Pada tahun 2020 kontribusi PDRB perdagangan sebesar 24,49 Sedangkan Realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 26,37. Dari data ini bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Madiun semakin meningkat.

Gambar 3.1
Grafik Time Series PDRB



A.2.3. Perbandingan realisasi 2024 dengan target akhir Renstra 2019-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
1.	Meningkatkan Peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	26,37	24,05

Dari table di atas dapat dilihat bahwa indikator Tujuan "Meningkatkan Peran Perdagangan Terhadap Perekonomian Daerah" sebesar 26,37 di Tahun 2024, dalam pencapaian target di akhir tahun 2024 yang tercantum di RENSTRA masih sebesar 24,05, sudah melebihi capaian sasaran sebesar 109,64 dari target akhir RENSTRA. Sehingga Dinas Perdagangan Kota Madiun harus tetap mempertahankan capaian sasaran kinerja yang telah dicapai.

A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	STANDAR PROVINSI	STANDARD NASIONAL
1. 2	Meningkatkan Peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	26,37	18,81	13,07

6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja, upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator serta tindak lanjut

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa terdapat faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

➤ Faktor Pendorong

1. Anggaran, program, kegiatan serta sarana prasarana yang mendukung di Dinas Perdagangan Kota Madiun ;
2. Optimalisasi dan koordinasi Sumber Daya Manusia dengan baik ;
3. Pengendalian inflasi melalui warung tekan inflasi dan promosi produk perdagangan melalui pameran-pameran dagang.

➤ Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM yang kompeten
2. Inovasi masih perlu ditingkatkan
3. Stabilisasi harga pada hari-hari tertentu masih harus dioptimalkan

➤ Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator

1. Pengendalian inflasi melalui Warung Tekan Inflasi
2. Menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang pokok dengan bekerjasama dengan produsen.

➤ Tindak Lanjut

1. Monitoring Evaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan
2. Meningkatkan kerjasama dengan lebih banyak produsen.

SASARAN PERTAMA :

” Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Pelayanan publik merupakan interaksi dinamis antara penyelenggara negara dan masyarakat. Pelayanan publik yang baik ditandai dengan adanya:

1. Aksesibilitas : Mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
2. Keadilan : Perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
3. Partisipasi : Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan.
4. Akuntabilitas : Penyelenggara pelayanan bertanggung jawab atas kinerja mereka.

Tujuannya dari IPP adalah sebagai berikut :

- Mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Memastikan masyarakat puas dengan kualitas pelayanan publik
- Memberi percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Capaian dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

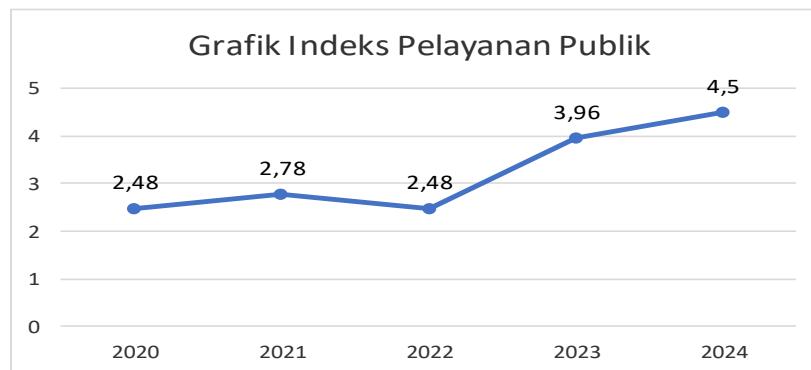
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,96 Indeks	4,50 Indeks	113,6 %

Berdasarkan penilaian Pelayanan Publik dari bagian Organisasi Kota Madiun, Capaian indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan target sebesar 3,96 indeks dapat tercapai 4,50 pada tahun 2024 yaitu dengan capaian 113,6 %.

A.2.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	2,78 Indeks	2,48 Indeks	2,78 Indeks	3,96 Indeks	4,50 Indeks

Perbandingan realisasi kinerja dengan indikator "Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik" pada tahun 2020 dengan indeks 2,78. Di tahun 2021 mendapat nilai 2,48, menurun dari tahun sebelumnya karena adanya pandemi. Pada tahun 2022 kembali mendapat indeks pelayanan publik 2,78. Dan pada tahun 2023 meningkat tajam dan mendapat nilai 3,96 indeks. Sedangkan Realisasi tahun 2024 yaitu 4,5 indeks. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan Dinas Perdagangan dari tahun ke tahun semakin baik.



A.2.3. Perbandingan realisasi 2024 dengan target akhir Renstra 2019 -2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,5 Indeks	3,96 Indeks

Dari table di atas dapat dilihat bahwa indikator "Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik" dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,5 Indeks di Tahun 2024, dalam pencapaian target di akhir tahun 2024 yang tercantum di RENSTRA masih sebesar 3,96, sudah melebihi capaian sasaran sebesar 113,6% dari target akhir RENSTRA. Sehingga Dinas Perdagangan Kota Madiun harus tetap mempertahankan capaian sasaran kinerja yang telah dicapai.

A.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	STANDAR PROPINSI	STANDAR NASIONAL
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,5 Indeks	N/A	N/A

A.2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator serta tindak lanjut.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa terdapat faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

➤ **Faktor Pendorong**

1. Anggaran, program, kegiatan serta sarana prasarana yang mendukung di Dinas Perdagangan Kota Madiun ;
2. Optimalisasi dan koordinasi Sumber Daya Manusia dengan baik ;
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan yang peduli, ramah dan cepat serta melengkapi sarana prasarana pelayanan publik untuk disabilitas.

➤ **Faktor Penghambat**

1. Belum Optimalnya Pengarsipan Dokumen.
2. Belum optimalnya Inovasi untuk pelayanan publik.
3. Belum adanya petugas khusus pada pelayanan publik

➤ **Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator**

1. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelayanan publik salah satunya untuk kaum disabilitas
2. Pelaksanaan pelayanan public sesuai regulasi yang telah ditetapkan
3. Membuat Tim pelayanan Publik

➤ **Tindak Lanjut**

1. Monitoring Evaluasi Rencana aksi dan realisasi kinerja secara berkala.
2. Segera menindaklanjuti keluhan atau pengaduan dari masyarakat

A.2.6. Analisis atas efisiensi

Untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing sasaran maka perlu dihitung efisiensinya sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi
2	3	4	$5=(4/3) \times 100$	6	7	$8=5 \times 6$	$9=8-7$	$10=(9/6) \times 100$
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3,96	4,5	113,6%	10.264.246.844	9.768.876.778	11.663.916.868,18	1.895.040.090,18	18,46%

Dari hasil perhitungan diatas Efisiensi dapat dicari dengan rumus :

$$\begin{aligned} &= \text{Total ((Alokasi Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja)-Realisasi} \\ &\quad \text{Anggaran))/\text{Total Alokasi Anggaran}) \\ &= \frac{1.895.040.090,18}{10.264.246.844,00} \times 100\% = 18,46\% \end{aligned}$$

Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran pertama Dinas Perdagangan, hasil analisis menyatakan bahwa efisien sebesar 18,46%.

A.3.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini.

SASARAN KEDUA : " Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan"

Perdagangan adalah aktivitas jual beli antara produsen dan konsumen, awal mula teori perdagangan muncul karena terjadi perdagangan internasional perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Berdasarkan mekanisme pasar, perdagangan ditentukan oleh harga dan ketersediaan barang tergantung pada Supply-Demand (untuk kategori barang bebas). Akan tetapi, pemerintah masuk untuk mengawasi barang primer (kebutuhan utama manusia) karena menyangkut hajat hidup banyak orang, pengaruh terhadap perekonomian nasional, keseimbangan Supply and Demand, barang yang disubsidi, perlindungan terhadap produsen/petani. Dan terdapat barang yang dilarang diperdagangkan seperti narkotika dan human trafficking. Perdagangan merupakan proses jual beli yang merupakan perputaran uang dan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor perdagangan eceran bukan mobil dan motor merupakan penjualan kembali (tanpa perantara teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga dalam hal ini termasuk di pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota madiun melalui Dinas Perdagangan. Volume perdagangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA 2023
2.	Meningkatnya volume usaha perdagangan	Percentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	4,23 %	4,3 6%	103,07%

Capaian indikator sasaran dengan target sebesar 4,23% dapat tercapai 103,07% pada tahun 2024 yaitu dengan capaian 4,36%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{volume perdagangan tahun } N - \text{volume perdagangan tahun } N-1}{\text{volume perdagangan tahun } N-1} \times 100 \% \\
 &= \frac{(3.492.486.000.000 - 3.346.255.000.000)}{3.346.255.000.000} \times 100 \% = 4,36 \%
 \end{aligned}$$

Volume usaha perdagangan tahun 2023 yang berkontribusi terhadap pertumbuhan daerah dari perdagangan eceran bukan mobil dan motor sesuai hasil survey dan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya adalah sebesar Rp. 3.346.255.000.000,-. Sedangkan *untuk tahun 2024* volume usaha perdagangan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan daerah dari perdagangan eceran bukan mobil dan motor sesuai hasil kajian dari Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebesar Rp. 3.492.486.000.000,- Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan volume perdagangan di tahun 2024 ini adalah 4,36% dari tahun sebelumnya.

A.3.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

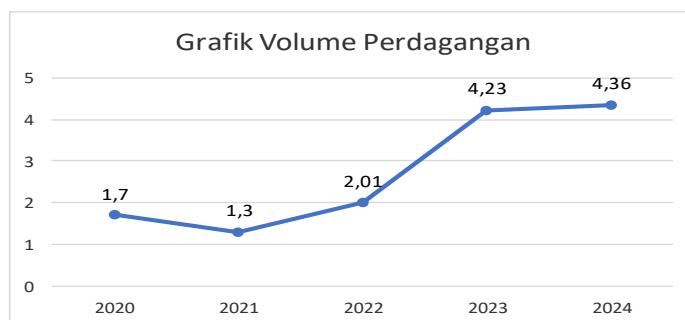
NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
2.	Meningkatnya volume usaha perdagangan	Percentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	1,7 %	1,3 %	2,01%	4,23%	4,36%

Pada tahun 2020 pertumbuhan volume usaha perdagangan adalah sebesar 1,7% dari tahun 2019. Pada tahun 2021 untuk volume usaha perdagangan pertumbuhannya terdapat kenaikan sebesar 1,3% dari tahun 2020. Persentase kenaikan pertumbuhannya tidak sebesar dari tahun sebelumnya disebabkan situasi dan kondisi pedagang eceran yang ada

dipasar dimana survey dilaksanakan masih belum normal, masih banyak kios tutup dan belum berjualan akibat pandemi yang masih berlangsung. Event-event yang diselenggarakan dipasar belum bisa dilaksanakan sehingga perdagangan belum sepenuhnya bangkit. Sedangkan *untuk* volume usaha perdagangan dari perdagangan eceran tahun 2022 yang diperoleh dari survey di pasar-pasar dan toko kelontong/eceran pertumbuhannya sebesar 2,01%. Pertumbuhannya naik kurang lebih 0,8% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 volume perdagangan pertumbuhannya naik sekitar 2,22% dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 4,23%. Sedangkan di tahun 2024 volume perdagangan pertumbuhannya naik sekitar 0,13% dari tahun sebelumnya yaitu di angka 4,36%

Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan perdagangan terutama perdagangan eceran di pasar-pasar dan toko kelontong semakin membaik. Grafik Volume perdagangan dari awal periode renstra adalah seperti pada grafik berikut :

Gambar 3.2
Grafik Volume Perdagangan



A.3.3. Perbandingan realisasi 2023 dengan target akhir Renstra 2019-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
2.	Meningkatnya volume usaha perdagangan	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	4,36 %	0,8 %

Dari table di atas dapat dilihat bahwa indikator "persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan" dengan realisasi sebesar 4,36 % di Tahun 2024, dalam pencapaian target di akhir tahun 2024 yang tercantum di RENSTRA masih sebesar 0,8 %, sudah melebihi

capaian sasaran sebesar 3,56 % dari target akhir RENSTRA. Sehingga Dinas Perdagangan Kota Madiun harus tetap mempertahankan capaian sasaran kinerja yang telah dicapai.

A.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	STANDAR PROVINSI	STANDAR NASIONAL
2.	Meningkatnya volume usaha perdagangan	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	4,36 %	N/A	N/A

A.3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator serta tindak lanjut.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa terdapat faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

➤ Faktor Pendorong

1. Anggaran, program, kegiatan serta sarana prasarana yang mendukung di Dinas Perdagangan Kota Madiun ;
2. Inovasi dan ide kreatif yang dikembangkan untuk menunjang seluruh event kegiatan baik secara digital maupun tatap muka ;
3. Pengendalian Inflasi melalui warung tekan inflasi;
4. Pelaksanaan event-event dan promosi produk perdagangan;

➤ Faktor Penghambat

1. Belum Optimalnya Distribusi Barang.
2. Belum Optimalnya pengetahuan masyarakat terkait perizinan berusaha secara online.

➤ Upaya yang dilakukan dalam mencapai target indikator

1. Promosi Produk Perdagangan

Promosi produk perdagangan bertujuan untuk memperluas produk agar dikenal Masyarakat. Produk-produk unggulan daerah yang dipromosikan diharapkan dapat ikut serta dalam meningkatkan volume perdagangan dan menggerakkan ekonomi daerah.

2. Warung Tekan Inflasi yang memberikan subsidi bahan pokok kepada masyarakat.

Pengendalian harga sangat penting untuk menjaga stabilisasi harga. Melalui Operasi pasar dan warung tekan inflasi diharapkan dapat menekan harga barang pokok dan memberikan kemudahan dan keringanan masyarakat dalam mendapatkan harga barang pokok

3. Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha secara online.

Kemudahan perizinan berusaha akan mendatangkan investor atau pengusaha yang akan menggerakkan perdagangan dan ekonomi daerah.

➤ **Tindak lanjut**

1. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
2. Melanjutkan program Warung Tekan Inflasi yang memberikan subsidi bahan pokok kepada masyarakat.
3. Secara masif melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha secara online.

A.3.5. Analisis atas efisiensi

Untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing sasaran maka perlu dihitung efisiensinya sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi
2	3	4	$5=(4/3) \times 100$	6	7	$8=5 \times 6$	$9=8-7$	$10=(9/6) \times 100$
Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	4,23%	4,36%	103,07%	723.693.250	712.795.245	745.934.413,71	33.139.168,71	4,58%

Dari hasil perhitungan diatas Efisiensi dapat dicari dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Total ((Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja)-Realisasi Anggaran)}/\text{Total Alokasi Anggaran} \\
 &= \frac{33.139.168,71}{723.693.250,00} \times 100\% = 4,58\%
 \end{aligned}$$

Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran kedua Dinas Perdagangan, hasil analisis menyatakan bahwa efisien sebesar 4,58%.

A.4.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

SASARAN KETIGA : " Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat"

Sesuai permenpan no.3 tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi maka perlu dilakukan perubahan beberapa indikator sasaran untuk lebih menajamkan capaian kinerja organisasi perangkat daerah. Sasaran awal adalah meningkatnya pendapatan retribusi pasar rakyat. Setelah dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan pendalaman Pohon Kinerja maka sasaran ini diubah menjadi Meningkatnya Kualitas pasar Rakyat dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja. Pasar berkualitas baik jika memenuhi tiga kriteria yakni jumlah total okupansi pedagang lebih dari 70% dari total asset kios/los yang ada, seluruh pasar telah menggunakan system pembayaran cashles, dan seluruh pasar terpelihara sarana dan parasarananya.

a. Okupansi Pasar

Salah satu indikator bahwa pasar berfungsi dengan baik adalah okupansi atau keterisian pedagang atau kios yang ada di pasar-pasar. Di Kota Madiun terdapat 17 pasar dengan los/kios sejumlah 3.668. Dari jumlah tersebut lebih dari 70% los/kios telah terisi yakni sejumlah 3.518. Sehingga bila diambil persentase yakni sebesar $3.518/3.668 = 95,91\%$. Apabila dilihat dari okupansi atau keterisian lebih dari 70% maka ketercapaian pasar yang berfungsi dengan baik adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan okupansi yang tinggi maka minat berjualan di pasar-pasar yang ada di Kota Madiun tinggi sehingga dapat menggerakkan sektor ekonomi . Dari 17 pasar yang ada di Kota Madiun, semua pasar okupansinya diatas 70% sehingga dapat dikatakan 100% pasar berfungsi dengan baik.

b. Cashless E retribusi

Merupakan salah satu inovasi publik yang mendukung terhadap SPBE demi terlaksananya integritas dan akuntabilitas disisi penerimaan daerah khususnya pasar rakyat, pengendalian dengan pembayaran e-retribusi memiliki peranan *preventive/pencegahan* terhadap fraud petugas dan tunggakan retribusi. Meningkatkan kepercayaan wajib retribusi terhadap petugas juru pungut Retribusi, Petugas tidak lagi membawa uang cash melainkan cashless, disisi pedagang pasar rakyat memiliki akses mengenai informasi terkait penyewaan tempat serta

data administratif lainnya. Kerjasama ini melibatkan pihak Bank Jatim dimana akan terhubung langsung dengan kas daerah penerimaan pemerintah kota madiun. Untuk 17 pasar yang ada di Kota Madiun sudah menggunakan non tunai, sehingga ketercapaian pasar yang menggunakan pembayaran cashless telah mencapai 100%.

c. Sarana Prasarana Pasar Rakyat yang terpelihara

Pada tahun 2024 Dinas Perdagangan telah melakukan pemeliharaan di seluruh pasar yang ada di Kota madiun. Dari 17 Pasar yang ada seluruhnya telah terpelihara sarana prasarnya melalui pemeliharaan Kebersihan, Listrik, Keamanan dan Ketertibannya. Selain pemeliharaan secara fisik juga ditunjang dengan SDM yang tersebar di seluruh pasar berupa tenaga kebersihan sejumlah 62 orang, tenaga keamanan sejumlah 59 orang dan tenaga Listrik sejumlah 8 orang. Seluruh pasar atau 100% pasar yang ada di pastikan telah terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk jual beli.

Sehingga dapat diperoleh persentase pasar yang berfungsi baik

$$\begin{aligned} \% \text{ Pasar yang berfungsi baik} &= \frac{\% \text{ okupansi pasar} + \% \text{ cashles E-retribusi} + \% \text{ sarpras yang terpelihara}}{3} \\ &= \frac{100\% + 100\% + 100\%}{3} = 100\% \end{aligned}$$

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA 2024
3.	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Presentase Rakyat berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

A.4 .2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2023	REALISASI 2024
3.	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Presentase Rakyat berfungsi dengan baik	100 %	100 %

Pada tahun 2203 indikator ini juga telah mencapai target yang diinginkan yakni 100%. Untuk tahun 2024 juga masih bisa

dipertahankan keterisian pedagang pasar lebih dari 70% di seluruh pasar, penggunaan dan pengembangan cashles serta pemeliharaan sarana prasarana pasar rakyat di 17 pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun.

A.4.3. Perbandingan realisasi 2024 dengan target akhir Renstra 2019-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
3.	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Presentase Pasar Rakyat yang berfungsi dengan baik	100%	100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa indikator "Meningkatnya Kualitas pasar Rakyat" dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Dari hasil tersebut keberhasilan dalam peningkatan kualitas pasar rakyat harus dipertahankan.

A.4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	STANDAR PROVINSI	STANDAR NASIONAL
3.	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Percentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	100 %	N/A	N/A

A.4.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator serta tindak lanjut

➤ Faktor Pendorong

1. Anggaran, program, kegiatan serta sarana prasarana yang mendukung di Dinas Perdagangan Kota Madiun ;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
3. Inovasi dan ide kreatif yang dikembangkan untuk menunjang seluruh event kegiatan baik secara digital maupun tatap muka, misal : portal parkir pasar, E-Retribusi, SIM Pasar dll ;

➤ **Faktor Penghambat**

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat baik pedagang maupun pembeli dalam ikut serta menjaga kebersihan pasar.
2. SDM yang ada perlu ditingkatkan skill dan kualitasnya.

➤ **Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator**

1. Revitalisasi Pasar Rakyat

Dengan Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan pasar yang layak dan nyaman untuk dijadikan tempat jual beli.

2. Pemeliharaan sarana prasarana pasar.

Selain Revitalisasi diperlukan juga pemeliharaan sarana prasarana pasar agar tetap terjaga dengan baik, misalnya: pemeliharaan gedung bangunan, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan ketertiban dllseshingga pasar tetap dalam kondisi baik.

3. Pembinaan pedagang pasar

Dalam upaya untuk mewujudkan peran serta pedagang dalam mewujudkan pasar yang nyaman maka dilakukan pembinaan pedagang pasar agar tercipta kerjasama yang kuat antara petugas dan pedagang dalam memelihara sarana prasarana, kebersihan dan keamanan pasar rakyat.

➤ **Tindak Lanjut**

1. Optimalisasi Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang berbasis teknologi;
2. Sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang.
3. Optimalisasi Digitalisasi retribusi pasar melalui E-Retribusi SIM Pasar
4. Peningkatan pelayanan pengaduan, keluhan pengguna pasar rakyat

A.4.6. Analisis atas efisiensi

Untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing sasaran maka perlu dihitung efisiensinya sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi
2	3	4	$5 = (4/3) \times 100$	6	7	$8 = 5 \times 6$	$9 = 8 - 7$	$10 = (9/6) \times 100$
Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	100%	100%	100%	5.643.298.691	5.534.825.503,91	5.643.298.691	108.473.187,09	1,92%

Dari hasil perhitungan diatas Efisiensi dapat dicari dengan rumus :

$$\begin{aligned} &= \text{Total } ((\text{Alokasi Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}) / \text{Total Alokasi Anggaran} \\ &= \frac{108.473.187,09}{5.643.298.691,00} \times 100\% = 1,92\% \end{aligned}$$

Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran ketiga Dinas Perdagangan, hasil analisis menyatakan bahwa efisien sebesar 1,92%.

A.5.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini.

SASARAN KEEMPAT : " Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen"

METROLOGI LEGAL adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan Teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

PENTINGNYA METROLOGI LEGAL

• **PERINTAH AGAMA**

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al – Isra' : 35)

• **AMANAT / DIATUR DALAM UU**

UU NO 2 TAHUN 1981 Tentang Metrologi Legal

- **MELINDUNGI MASYARAKAT**

UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI
LEGAL

- UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH.

Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera. Peneraan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sebuah kebenaran Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan diakhiri dengan pembubuhan cap tanda tera. UPTD metrologi memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan perdagangan dan industri yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari UTTP yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal. UPTD Metrologi pada Dinas Perdagangan Kota Madiun memiliki tugas sebagai Melaksanakan Pengujian UTTP, Melakukan pengujian atau penelitian terhadap alat ukur untuk dibandingkan dengan standar sesuai dengan satuan ukur yang berlaku dan dilakukan oleh tenaga ahli atau berhak. Dalam Pelaksanaan tera perlu dilakukan pengawasan hasil peneraan. Sehingga diperoleh data kesesuaian takaran atau timbangan produk yang diperdagangkan.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA 2024
4.	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	100%	100%	100%

Dalam pengawasan tera diambil sampling produk yang diperdagangkan. Sampling produk tersebut kemudian ditimbang melalui alat timbang ukur ulang Elektronik yang di sediakan oleh Dinas Perdagangan. Dari hasil penimbangan tersebut diperoleh data apakah takaran atau timbangan sesuai dengan jumlah timbangan yang dibeli oleh Masyarakat. Target sampling yang diambil dalam pengawasan ini adalah sebanyak 2720 kali selama satu tahun. Sesuai dengan Sk Dirjen PKTN No. 115 Tahun 2022

tentang Instruksi Kerja Pemeriksaan UTTP bagi Juru Ukur, Takar dan Timbang bahwa pengambilan sampling ini diberlakukan untuk hasil pertanian, Perkebunan, peternakan, industri, kehutanan dan perikanan yang sudah diolah dengan margin eror atau toleransi kurang 9% untuk berat barang 100 s/d 500 gram, 6% untuk berat barang 500 s/d 1.000 gram, 1,5% untuk berat barang 1.000 s/d 10.000 gram dan 1% untuk berat barang lebih dari 10.000 gram.

Sehingga diperoleh hasil pengawasan takaran dan timbangan dengan prosentase sebagai berikut :

- Persentase kesesuaian takaran/timbangan

$$= \frac{\text{Realisasi Kesesuaian Sampling Takaran/Timbang}}{\text{Target Kesesuaian Sampling Takaran/Timbang}} \times 100\%$$

$$= \frac{2720}{2720} \times 100\% = 100\%$$

A.5.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2023	REALISASI 2024
4.	Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	100%	100%

Pada Tahun 2023 Indikator Sasaran "Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan" telah mencapai 100%. Dan pada tahun 2024 ini berdasarkan hasil sampling yang diambil yakni sebanyak 2720 sampling kesesuaian timbangan telah mencapai 100%.

A.5.3. Perbandingan realisasi 2024 dengan target akhir Renstra 2019-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
4.	Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	100%	100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa indikator "Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen' yang telah dicapai masih berlangsung dan belum dpt dibandingkan dengan akhir periode renstra.

A.5.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2024	STANDAR PROVINSI/ NASIONAL
4.	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	100 %	N/A

A.5.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator serta tindak lanjut.

➤ Faktor Pendorong

1. Anggaran, program, kegiatan serta sarana prasarana yang mendukung di Dinas Perdagangan Kota Madiun ;
2. Inovasi dan ide kreatif yang dikembangkan untuk menunjang seluruh kegiatan, misalnya dengan jemput bola peralatan tera di pasar maupun di toko kelontong.

➤ Faktor Penghambat

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait tertib ukur dan tera, tera ulang alat ukur.
2. Kurangnya petugas tera yang berhak memberi tanda tera yang sah.

➤ Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator

1. Peningkatan Pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan BDKT di pasar-pasar terutama pada hari besar nasional.
Dalam mewujudkan perlindungan kepada masyarakat terkait kesesuaian takaran dan timbangan maka lebih ditingkatkan pelaksanaan tera, tera ulang timbangan dan pengawasannya terutama pada menjelang hari besar nasional. Kesesuaian takaran timbangan menjadikan proses jual beli lancar dan pembeli tidak merasa dicurangi.

2. Diklat SDM Penera dan Pengawas Tera

Tenaga terampil di bidang tera masih sangat terbatas. Sedangkan untuk mewujudkan tertib ukur diperlukan penera yang handal dalam melakukan peneraan terhadap alat ukur takar timbang. Oleh karena itu telah dilakukan upaya untuk mengirim petugas guna mengikuti diklat penera.

➤ Tindak Lanjut

1. Jemput Bola Pelaksanaan Tera, Tera ulang dan Pengawasan Barang dalam Kemasan terbungkus pada lokasi lokasi strategis (pasar, warga masyarakat dll)
2. Meningkatkan Pelatihan atau diklat pada petugas tera dan pengawasan barang dalam kemasan terbungkus

A.5.6. Analisis atas efisiensi

Untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing sasaran maka perlu dihitung efisiensinya sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi
2	3	4	$5=(4/3) \times 100$	6	7	$8=5 \times 6$	$9=8-7$	$10=(9/6) \times 100$
Meningkatnya Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	100%	100%	100%	224.674.843	221.500.900	224.674.843	3.173.943	1,41%

Dari hasil perhitungan diatas Efisiensi dapat dicari dengan rumus :

$$\begin{aligned} &= \text{Total } ((\text{Alokasi Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}) / \text{Total Alokasi Anggaran} \\ &= \frac{3.173.943,00}{224.674.843,00} \times 100\% = 1,41\% \end{aligned}$$

Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran keempat Dinas Perdagangan, hasil analisis menyatakan bahwa efisien sebesar 1,41%.

A.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja

Pencapaian sasaran dengan indikator Dinas Perdagangan Kota Madiun dapat tercapai dengan didukung oleh 6 program urusan perdagangan dan 14 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Pagu Anggaran
Program Penunjang Urusan Peemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Outcome : Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	10.264.246.844,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output : Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah Daerah	129.036.500,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	129.036.500,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	8.652.173.876,00
Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.652.173.876,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output : Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	125.824.200,00
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	125.824.200,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	249.696.266,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output : Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.696.266,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output : Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan Pemerintahan	65.986.550,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Pagu Anggaran
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.661.550,00
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25.325.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	726.468.958,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	726.468.958,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	315.060.494,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	227.780.606,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Output : Prosentase gedung yang layak digunakan	27.045.688,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Output : Prosentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	60.234.200,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Pagu Anggaran
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Outcome : Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	86.160.400,00
Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Output : Prosentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	86.160.400,00

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Output : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	86.160.400,00
---	----------------------

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Pagu Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Outcome : Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	5.643.298.691,00
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Output : Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	1.307.139.091,00
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Output : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	492.513.313,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Output : Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	814.625.778,00
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Output : Pesentase pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	4.336.159.600,00
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	258.922.000,00
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.077.237.600,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Pagu Anggaran
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Outcome : Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok Dan Barang Penting	300.254.200,00

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Output : Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	279.621.200,00
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Output : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	111.443.600,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	168.177.600,00
Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Output : Persentase tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	20.633.000,00
Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Output : Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.633.000,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Pagu Anggaran
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Outcome : Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	224.674.843,00
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Output : Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	224.674.843,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Output : Jumlah Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Sudah Di Tera Atau Tera Ulang	217.342.843,00
Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Output : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	7.332.000,00
Program/Kegiatan/Indikator	Pagu Anggaran
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Outcome : Persentase produk perdagangan yang di promosikan	337.278.650,00

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Outcome : Jumlah terlaksananya Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	337.278.650,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Outcome : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	337.278.650,00

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Keuangan untuk alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Alokasi Belanja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Belanja Operasi	16.421.327.078,-	15.814.404.722,-	96,30 %
2.	Belanja Modal	434.586.550,-	423.593.704,91,-	97,47 %
	Jumlah Belanja	16.855.913.628,-	16.237.998.426,91,	96,33 %

Dari anggaran belanja langsung diatas dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu anggaran untuk rutin dan anggaran untuk program. Secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Belanja Langsung	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Anggaran Rutin/Pendukung	10.264.246.844,-	9.768.876.778,-	95,17 %
2.	Anggaran Program Strategis/Prioritas	6.591.666.784,-	6.469.121.648,91,-	98,14 %
	Jumlah Belanja	16.855.913.628,-	16.237.998.426,91,-	96,33 %

- a. Anggaran Rutin : Rp. 10.264.246.844,-

Pelaksanaan kegiatan anggaran rutin merupakan kegiatan pendukung dengan 1 program 7 kegiatan dengan capaian 95,17 %

- b. Anggaran Program : Rp. 6.591.666.784,-

Adapun capaian penyerapan anggaran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 10.264.246.844,-	Rp. 9.768.876.778,-	95,17 %
		JUMLAH	Rp. 10.916.553.086,-	Rp. 9.832.574.993,-	90,07 %

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Capaian
2	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 86.160.400,-	Rp. 86.078.900,-	99,91 %
		2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 300.254.200,-	Rp. 291.153.235,-	96,97 %
		3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 337.278.650,-	Rp. 335.563.110,-	99,49 %
		JUMLAH	Rp. 723.693.250,-	Rp. 712.795.245,-	98,49 %

3	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 5.643.298.691,-	Rp. 5.534.825.503,91,-	98,08%
		JUMLAH	Rp. 5.643.298.691,-	Rp. 5.534.825.503,91,-	98,08%

4	Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 224.674.843,-	Rp. 221.500.900,-	98,59%
		JUMLAH	Rp. 224.674.843,-	Rp. 221.500.900,-	98,59%

C. EFISIENSI ANGGARAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini sasaran Dinas Perdagangan telah efisien sesuai yang diharapkan dapat ditunjukkan dengan perhitungan pada tabel sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi
2	3	4	5=(4/3)x100	6	7	8=5x6	9=8-7	10=(9/6)x100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3,96	4,5	113,6%	10.264.246.844	9.768.876.778,00	11.663.916.868,18	1.895.040.090,18	18,46%
Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	4,23%	4,36%	103,07%	723.693.250	712.795.245,00	745.934.413,71	33.139.168,71	4,58%
Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	100%	100%	100%	5.643.298.691	5.534.825.503,91	5.643.298.691,00	108.473.187,09	1,92%
Meningkatnya Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	100%	100%	100%	224.674.843	221.500.900,00	224.674.843,00	3.173.943	1,41%
TOTAL			16.855.913.628	16.237.998.426,91	18.277.824.815,89	2.039.826.388,98	12,10%	

Dari hasil perhitungan diatas Efisiensi dapat dicari dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Total ((Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja)-Realisasi Anggaran)}/\text{Total Alokasi Anggaran} \\
 &= \frac{2.039.826.388,98}{16.855.913.628,00} \times 100\% = 12,10\%
 \end{aligned}$$

Sehingga efisiensi dari semua sasaran ini adalah 12,10%

A.7. Hasil Pelaksanaan Gender Pada Dinas Perdagangan

Dalam era modern ini setiap program kegiatan selalu dikaitkan dengan isu-isu gender. Dalam setiap sasaran Dinas Perdagangan selalu dikaitkan dengan pengarusutamaan gender. Diantara dapat dilihat isu gender yang ada pada Dinas Perdagangan adalah pada pembinaan PKL dan Pembinaan seluruh tenaga upahan yang bertugas sebagai tenaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan petugas pengawas Listrik di 17 pasar yang ada di Kota Madiun sebagai berikut :

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan yang Responsif Gender diantara lain :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Swalayan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagang

Tabel 3.2
Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) s.d Triwulan IV Tahun 2024

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RESPONIF GENDER	KINERJA		KEUANGAN		KET
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan: Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Swalayan • Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 	75 Dokumen	75 Dokumen	86.160.400	86.078.900	-
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya • Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 	2 Dokumen	2 Dokumen	4.077.237.600	4.064.310.100	-

Gambar 3.3
Data Terpilah Gender Pada Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2024



A.8. INOVASI PERANGKAT DAERAH

1. Warung Tekan Inflasi (WARTEK Inflasi)

Merupakan inovasi pelayanan publik terkait dengan pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan menyelenggarakan program penyaluran belanja subsidi. Tujuan dari inovasi ini untuk menstabilkan harga sehingga dapat membantu masyarakat membeli barang kebutuhan pokok dengan mudah dan murah. Pelaksanaan program ini di Wartek (Warung Tekan Inflasi) yang tersedia sewilayah Kota Madiun. Inovasi ini di kolaborasikan dengan web sistem yang didesain oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, dengan nama "Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SI OPA OMA)", yang tujuannya untuk merekam transaksi penjualan komoditas yang disubsidi untuk membatasi pembelian dalam jangka waktu tertentu.

2. SIM PASAR

Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan adalah E-Retribusi SIM Pasar. E-Retribusi Sistem Informasi Manajemen Pasar adalah Sistem Informasi Mengenai Keseluruhan Data, Aktivitas Perdagangan Serta Catatan Administratif Pasar Dan Menggabungkan Semua Sistem Informasi Maupun Transaksi Dari Yang Sudah Ada Serta Sebagai Staging / Penghubung Antara Sistem Manual Dan Sistem Elektronik Dalam Hal ini sangat berdampak terhadap retribusi yang ada dimana retribusi di pasar akan sepenuhnya menggunakan *cash/less payment*. Juru Pungut Retribusi melakukan pungutan retribusi kesemua pedagang dengan sistem pembayaran nirtunai/*cash/less* tanpa menggunakan tunai/*cash* secara real time sehingga dimanapun berapa semua laporan pembayaran dapat terbaca jelas serta penerimaan bisa langsung masuk ke rekening kas daerah tanpa melalui parkir tunai/*cash* di sisi juru pungut sehingga akuntabel terbentuk serta terjadi percepatan laporan pembukuan.

Dari Inovasi yang diberikan maka akan terjadi pergantian pola manual menjadi digitalisasi untuk meningkatkan keefektifan, efisien , tepat dari sisi pemerintah untuk melayani pedagang di pasar.

- a. Surat Rekomendasi input dan diterbitkan By Sistem
- b. Penetapan SKRD by Sistem terhubung pembayaran VA (Virtual Account Bank)
- c. Pembayaran sewa Los, Kios Yang Pertama dengan Cashless.

BAB IV

PENUTUP

A. SARAN

Rumusan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi tersebut.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 pada umumnya telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik, namun untuk dimasa yang akan datang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dukungan sarana dan prasarana serta dana yang memadai masih perlu ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang ada bisa lebih optimal guna mewujudkan tujuan Dinas Perdagangan Kota Madiun.

B. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Perangkat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2024 yang kami susun merupakan Laporan dari kinerja Dinas Perdagangan selama tahun 2024 dengan capaian kinerja yang sangat baik. Dari 4 (empat) indikator yang ada seluruhnya telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Untuk Indikator pertama yakni Indeks Pelayanan Publik dengan target 3,96 indeks didapat realisasi 4,5 indeks dengan capaian 113,6%. Indikator kedua Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan dengan target 4,23% didapat realisasi 4,36% dengan capaian 103,07%. Indikator ketiga Persentase pasar rakyat yang berfungsi baik 100% didapat realisasi 100% dengan capaian 100%. Sedangkan pada Indikator keempat yakni Layanan UTTP dan BDKT dengan target 100% didapat realisasi 100% dengan capaian 100%. Secara umum capaian kinerja telah mencapai diatas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

C. UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 kami coba atasi dengan menyesuaikan hasil kinerja yang telah dilaksanakan disamping kinerja yang telah diperjanjikan, yang lebih menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun. Langkah-langkah penyempurnaan Laporan Kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu untuk menyempurnakan kinerja secara umum akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

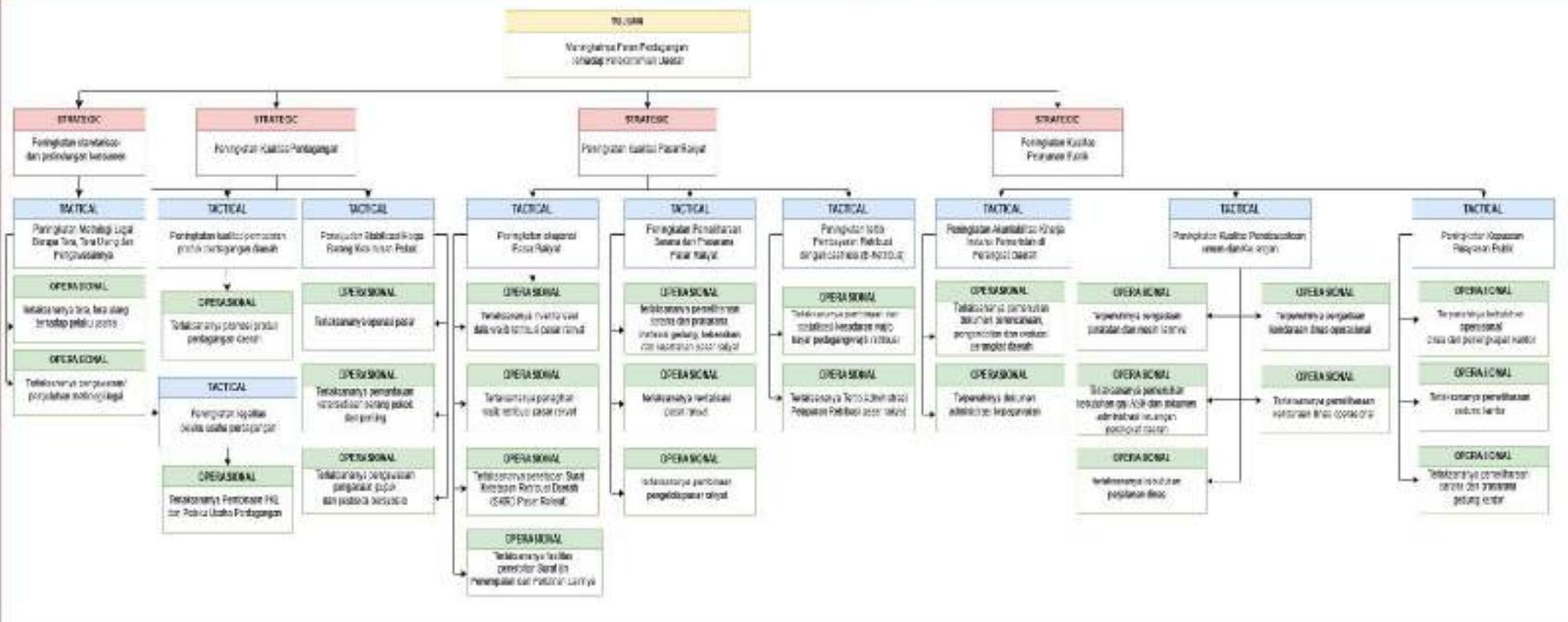
1. Pengendalian Inflasi melalui Warung Tekan Inflasi (Wartek)
2. Pengembangan dan penyempurnaan Digitalisasi Sistem Perdagangan ;
3. Meningkatkan Standar Pelayanan instansi ;
4. Evaluasi dan Inovasi dalam melakukan pelayanan prima
5. Koordinasi dan kolaborasi dengan pihak -pihak terkait

Hasil dari realisasi pada tahun 2024 ini akan digunakan sebagai dasar dan pertimbangan dalam penyusunan penyusunan di tahun berikutnya.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat menjadi kajian dan evaluasi bagi pelaksanaan program ditahun-tahun yang akan datang, untuk menjadi lebih baik lagi. Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Madiun.

POHON KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025 – 2026

PERENCANAAN DAN PERDAGANGAN BUDAYA MELAKA DILAKUKAN



KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN



ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (Iv/c)
NIP 197205101992011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BsxE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Matriks Renstra Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Kota Madiun
Tahun 2025 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
								Tahun (2025)		Tahun (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Meningkatkan peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Percentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83,85	A (Skor)	11.450.521.036	A (Skor)	11.542.892.030	A (Skor)	10.986.292.030	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah.	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	100%	8.941.595.764	100%	8.941.595.764	100%	8.941.595.764	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	70 orang/bulan	8.941.595.764	70 orang/bulan	8.941.595.764	70 orang/bulan	8.941.595.764	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	100%	144.614.200	100%	170.000.000	100%	170.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 205 02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	1 paket	124.614.200	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 205 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 205 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	5.000.000	60 Orang	5.000.000	60 Orang	5.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	100%	249.696.266	100%	249.696.266	100%	249.696.266	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 Laporan	249.696.266	12 Laporan	249.696.266	12 Laporan	249.696.266	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%	936.600.000	100%	966.600.000	100%	410.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	756.600.000	1 Unit	756.600.000	1 Unit	200.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	180.000.000	10 unit	180.000.000	5 unit	180.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	100%	800.000.000	100%	820.000.000	100%	820.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	820.000.000	12 Laporan	820.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi			
									Tahun (2025)		Tahun (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
				target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
Meningkatnya Kualitas Perdagangan	Indeks Pengelolaan Perdagangan			X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	100%	328.014.806	100%	345.000.000	100%	345.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	44 unit	227.780.606	44 unit	230.000.000	44 unit	230.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				X	XX	01	209	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	3 unit	40.000.000	3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	160 unit	60.234.200	160 unit	65.000.000	160 unit	65.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
	Meningkatnya Kualitas Perdagangan	Indeks Pengelolaan Perdagangan		3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Percentase legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	127%	100%	87.270.400	100%	90.000.000	100%	90.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	'02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	127%	75 dokumen	87.270.400	80 dokumen	90.000.000	80 dokumen	90.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	'02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	95 Surat	12 Laporan	87.270.400	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Percentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik		3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100%	100%	5.656.704.842	100%	5.665.145.240	100%	5.665.145.240	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 Pasar	17 Pasar	1.195.375.642	17 Pasar	1.200.145.240	17 Pasar	1.200.145.240	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Pasar	3 unit	320.375.642	3 unit	300.145.240	3 unit	300.145.240	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Pasar	17 unit	875.000.000	17 unit	900.000.000	17 unit	900.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Percentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100%	100%	4.461.329.200	100%	4.465.000.000	100%	4.465.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Kali	4 dokumen	243.722.000	4 dokumen	245.000.000	4 dokumen	245.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	118 Orang	2 dokumen	4.217.607.200	2 dokumen	4.220.000.000	2 dokumen	4.220.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
	Meningkatnya Kualitas Perdagangan	Indeks Pengelolaan Perdagangan		3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Percentase pemantauan ketersediaan barang pokok dan penting	100%	100%	319.163.000	100%	344.993.000	100%	519.993.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
									Tahun (2025)		Tahun (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
				target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Percentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3 30 04 2.02	3	30	04	2.02	jumlah pemantauan ketersedian barang pokok dan penting	100%	3 kali	299.170.000	3 kali	325.000.000	3 kali	500.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun	
				3	30	04	2.02	0001	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3 kali	3 laporan	124.170.000	3 laporan	125.000.000	3 laporan	125.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	04	2.02	0003	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	175.000.000	4 Laporan	200.000.000	2 Laporan	375.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun	
				3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	19.993.000	100%	19.993.000	100%	19.993.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun	
				3	30	04	2.03	0002	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Kali	2 laporan	19.993.000	2 laporan	19.993.000	2 laporan	19.993.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3 30 06	3	30	06		Percentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	101,6	100%	269.332.000	100%	272.000.000	100%	272.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun	
				3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	12 Bulan	12 bulan	269.332.000	12 bulan	272.000.000	12 bulan	272.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun	
				3	30	06	2.01	0001	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	8448 UTTP	8186 Unit	262.000.000	8186 Unit	262.000.000	8186 Unit	262.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				3	30	06	2.01	0002	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	9 Lokasi	150 Orang	7.332.000	150 orang	10.000.000	150 Orang	10.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
Meningkatnya Kualitas Perdagangan	Indeks Pengelolaan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3 30 07	3	30	07		Percentase produk perdagangan yang dipromosikan	100%	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun	
				3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	4 Kali	4 Kali	350.000.000	4 Kali	350.000.000	4 Kali	350.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun	
				3	30	07	2.01	0005	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kali	4 UMKM	350.000.000	4 UMKM	350.000.000	8 UMKM	350.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun



WALI KOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANSAR RASIDI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : PJ WALIKOTA MADIUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM


Madiun, 36 September 2024
Pihak Pertama,
ANSAR RASIDI, S.Sos., M.Si
NIP 197205101992011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERDAGANGAN

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Persentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.96 Indeks
4.	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	4.23 %

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.264.246.844
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	86.160.400
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.643.298.691
4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	300.254.200
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	224.674.843
6.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	337.278.650
	Jumlah	Rp. 16.855.913.628



PENETAPAN TARGET KINERJA BERDASARKAN REALISASI 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,96	4,5	4,5
2.	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	4,23%	4,36%	-
	Meningkatnya Kualitas Perdagangan	Indeks Pengelolaan Perdagangan	-	-	96,50%
3.	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Persentase Pasar Rakyat yang bedungsi dengan baik	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang di perdagangkan	100%	100%	95%





WALI KOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ansar Rasidi, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

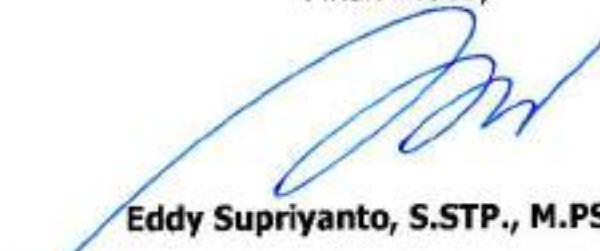
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,


Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.

Pihak Pertama,


Ansar Rasidi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197205101992011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,5 indeks
2.	Meningkatnya Kualitas Perdagangan	Indeks Pengelolaan Perdagangan	96,50 %
3	Meningkatnya Kualitas Pasar rakyat	Persentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	100 %
4	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	95 %

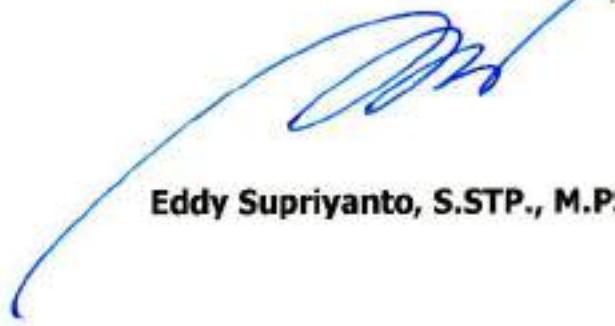
No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	Rp. 10.423.001.201,-	-
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	138.472.400,-	-
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	5.513.115.078,-	-
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	378.804.200,-	-
5.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	383.030.385,-	-
6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	262.258.625,-	-

J u m l a h

Rp. 17.098.681.889,-

Madiun, 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA MADIUN

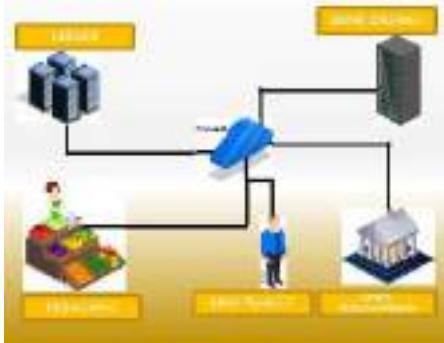

Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN**


**Ansar Rasidi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197205101992011001**

DATA PRAKTIK BAIK / INOVASI PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAYANAN PUBLIK : DINAS PERDAGANGAN

No	Nama Instansi	Judul Praktik Baik / Judul Inovasi Pelayanan Publik	Tanggal Mulai Pelaksanaan	Gambaran Singkat Praktik Baik / Inovasi Pelayanan Publik	Penerima Dampak Praktik Baik / Inovasi Pelayanan Publik
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perdagangan	SIM PASAR (Sistem Informasi Pasar) 	1 Januari 2023	<p>Merupakan Inovasi Pelayanan Publik dalam hal pengelolaan administrasi di pasar baik penerima retribusi maupun database pedagang. Pengendalian dengan E-retribusi ini memiliki peranan preventive/pencegahan terhadap tunggakan retribusi, Disisi lain juga mendukung SPBE dimana proses didalamnya tidak lagi menggunakan pembayaran cash melainkan <i>cashless</i> sehingga tidak ada lagi petugas membawa uang <i>cash</i>, akuntabilitas juga terjaga serta mengeliminasi kemungkinan fraud atau resiko pelanggaran. Pedagang Juga Memiliki akses mengenai informasi terkait penyewaan tempat serta data administratif lainnya, kerjasama ini melibatkan pihak Bank Jatim dimana akan terhubung langsung dengan rekening kas daerah Pemerintah Kota Madiun</p>	Masyarakat dan Pemerintah Kota Madiun

No	Nama Instansi	Judul Praktik Baik / Judul Inovasi Pelayanan Publik	Tanggal Mulai Pelaksanaan	Gambaran Singkat Praktik Baik / Inovasi Pelayanan Publik	Penerima Dampak Praktik Baik / Inovasi Pelayanan Publik
1	2	3	4	5	6
2	Dinas Perdagangan	"WARTEK Inflasi Kota Madiun (Warung Tekan Inflasi)"	1 Oktober 2022	Merupakan inovasi pelayanan publik terkait dengan pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan menyelenggarakan program penyaluran belanja subsidi. Tujuan dari inovasi ini untuk menstabilkan harga sehingga dapat membantu masyarakat membeli barang kebutuhan pokok dengan mudah dan murah. Pelaksanaan program ini di Wartek (Warung Tekan Inflasi) yang tersedia se-wilayah Kota Madiun. Inovasi ini di kolaborasikan dengan website yang didesain oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, dengan nama "Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SI OPA OMA)", yang tujuannya untuk merekam transaksi penjualan komoditas yang disubsidi untuk membatasi pembelian dalam jangka waktu tertentu.	Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

Ansar Rasidi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197205101992011001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id/>



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

**DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN**



PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PERDAGANGAN

Jalan. Salak Nomor. 67 Kode Pos 63131

Telepon 0351-473929 Faks. (0351) 485081

Pos-el perdagangan@madiunkota.go.id Laman <http://perdagangan.madiunkota.go.id>

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

Pada hari ini, Selasa 31 Desember 2024 bertempat di Dinas Perdagangan Kota Madiun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si

NIP : 19720510 199201 1 001

Jabatan Kedinasan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun

Berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/246/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024, ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran/ Barang Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

2. Nama : EDHI SOEHARDONO, SE

NIP : 19680821 199803 1 001

Jabatan Kedinasan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Madiun

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Nomor 050-401.107/05/2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Madiun, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Telah dilakukan evaluasi Internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan hasil sebagaimana berikut :

A. Anggaran Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2024 sebesar sebesar Rp. 4.614.000.000 dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar Rp. 4.808.234.681 atau sebesar 104,21%.

B. Anggaran Belanja

Anggaran belanja daerah Tahun 2024 pada Dinas Perdagangan Kota Madiun sebesar Rp. 16.855.913.628 dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar Rp. 16.237.998.426,91 atau 96,33%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp. 617.915.201,91 atau 3,67% (*dengan rincian sebagaimana terlampir*).

C. Capaian Kinerja

Sesuai realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan IV, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 2024 didapatkan hasil sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,96	4,5	113,6%
2	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	4,23%	4,36%	103,07%
3	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Persentase Pasar Rakyat yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase kesesuaian takaran/ timbangan produk yang diperdagangkan	100%	100%	100%

Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya

Mengetahui,



**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN**



ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197205101992011001

Madiun, 31 Desember 2024

Ketua Tim SAKIP

Sekretaris



EDHI SOEHARDONO, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 196808211998031001

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	URAIAN	SASARAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
		2	3	4				7	8	9	10
1	Meningkatnya nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	84,34	100,28%	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.264.246.844	9.768.876.778	95,17%
2	Terwujudnya perusahaan yang memperbarui perizinan	2	Prosentase Perusahaan yang memperbarui perijinan	100%	100%	100%	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	86.160.400	86.078.900	99,91%
3	Terwujudnya pasar yang dikelola sarana distribusinya	3	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100%	100%	100%	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.643.298.691	5.534.825.504	98,08%
4	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	4	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	300.254.200	291.153.235	96,97%
5	Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	5	Persentase UTTP dan BDKT yang telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100%	100%	100%	5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	224.674.843	221.500.900	98,59%
6	Terwujudnya produk perdagangan yang dipromosikan	6	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100%	100%	100%	6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	337.278.650	335.563.110	99,49%
J U M L A H									16.855.913.628	16.237.998.426,91	96,33%

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1. Anggaran, program, kegiatan serta sarana prasarana yang mendukung di Dinas Perdagangan Kota Madiun
2. Optimalisasi dan koordinasi Sumber Daya Manusia dengan baik
3. Pengendalian Inflasi melalui warung tekan inflasi
4. Inovasi dan ide kreatif yang dikembangkan untuk menunjang seluruh event kegiatan baik secara digital maupun tatap muka, misal : portal parkir pasar, E-Retribusi, SIM Pasar dll

- Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Belum Optimalnya kompetensi SDM dan Pengarsipan Dokumen
2. Belum Optimalnya Revitalisasi Pasar Rakyat
3. Belum Optimalnya Distribusi Barang Pokok Penting
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait terib ukur dan tera, tera ulang alat ukur.

- Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

1. Tertib administrasi dan monitoring evaluasi program kegiatan
2. Optimalisasi Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang berbasis teknologi;
3. Melanjutkan program Warung Tekan Inflasi yang memberikan subsidi bahan pokok kepada masyarakat.
4. Jemput Bola Pelaksanaan Tera, Tera ulang dan Pengawasan Barang dalam Kemasan terbungkus pada lokasi lokasi strategis (pasar, warga masyarakat dll)



Desember 2024

ANSAR BASIDI, S.Sos, M.Si

Perwira Utama Muda

NIP. 19720510 199201 1 001

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	84,34	100,28%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.264.246.844	9.768.876.778	95,17%
J U M L A H							10.264.246.844	9.768.876.778	95,17%

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Setiap program penyerapan dana dibagi dalam 4 triwulan sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Belum Optimalnya Pengarsipan Dokumen
2. Belum optimalnya Inovasi untuk pelayanan publik.
3. Belum adanya petugas khusus pada pelayanan publik

Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

1. Monitoring Evaluasi Rencana aksi dan realisasi kinerja secara berkala.
2. Tertib administrasi dan monitoring evaluasi program kegiatan.

Madiun, Desember 2024
Sekretaris,


EDHI SOEHARDONO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 196808211998031001

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	Capaian
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 orang/ bulan	68 orang/ bulan	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.652.173.876	8.211.581.531	94,91%
2	Terlaksananya kebutuhan perjalanan dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.696.266	249.061.991	99,75%
3	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.661.550	35.750.000	87,92%
	Terlaksananya administrasi umum dan kebutuhan operasional dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100%		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.325.000	23.172.400	91,50%
4	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	726.468.958	709.110.480	97,61%
5	Terpenuhinya kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	44 Unit	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.780.606	203.114.576	89,17%

6	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.045.688	26.985.800	99,78%
7	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	122 Unit	122 Unit	100%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.234.200	59.273.200	98,40%
J U M L A H								10.009.386.144	9.518.049.978	95,09%

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Pencairan Anggaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Belum Optimalnya kompetensi SDM dan Pengarsipan Dokumen.
2. Belum optimalnya Inovasi untuk pelayanan publik.
3. Belum adanya petugas khusus pada pelayanan publik

Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

1. Tertib administrasi dan monitoring evaluasi program kegiatan

Madiun, Desember 2024
Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan



NUNUNG KRISNA APRIANTO, ST
Penata
NIP. 19790427 200604 1 008

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	Capaian
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	129.036.500	125.927.000	97,59%
2	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	125.824.200	124.899.800	99%
JUMLAH								254.860.700	250.826.800	98,42%

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal akan mempermudah mempercepat keberhasilan kinerja baik Program/Kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Aplikasi kepegawaian belum sempurna sehingga belum bisa digunakan memproses administrasi kepegawaian
2. Belum Optimalnya kompetensi SDM dan Pengarsipan Dokumen.

Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

1. Monitoring Evaluasi Rencana aksi dan realisasi kinerja secara berkala

Maduun, Desember 2024
Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Kepegawaian

NUNUNG KRISNA APRIANTO, ST

Penata

NIP. 19790427 200604 1 008

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pasar yang dikelola sarana distribusinya	1. Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100%	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.643.298.691	5.534.825.503,91	98,08%
J U M L A H							5.643.298.691	5.534.825.503,91	98,08%

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Setiap program penyerapan dana dibagi dalam 4 triwulan sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat baik pedagang maupun pembeli dalam ikut serta menjaga kebersihan pasar.
2. SDM yang ada perlu ditingkatkan kemampuan dan kualitasnya.

Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

1. Optimalisasi Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang berbasis teknologi;
2. Sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang.
3. Optimalisasi Digitalisasi retribusi pasar melalui E-Retribusi SIM Pasar
4. Peningkatan pelayanan pengaduan, keluhan pengguna pasar rakyat

Mediun, Desember 2024
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat

Drs. PUGUH SUPARDIJANTO

Pembina Tingkat I

NIP. 19710911 199201 1 002

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

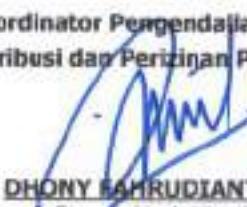
NO	SASARAN					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksanya fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	17 Unit	100%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	814.625.778	736.613.799	90,42%
2	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi kesadaran wajib bayar pedagang/wajib retribusi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	258.922.000	247.348.000	95,53%
J U M L A H								1.073.547.778	983.961.799	91,66%

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- Adanya anggaran APBD untuk penyediaan sarana distribusi perdagangan pasar rakyat
- Peran serta petugas lapangan dalam penertiban dan pengelolaan pasar rakyat

Madiun, Desember 2024

**Subkoordinator Pengendalian, Pengelolaan
Retribusi dan Perizinan Pasar Rakyat**


DHONY FAHRUDIANTO A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198503172009011004

- Faktor penghambat pencapaian kinerja :

- Kurangnya kesadaran Masyarakat baik pedagang maupun pembeli dalam ikut serta menjaga kebersihan pasar.

- Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

- Sosialisasi dan pembinaan pedagang pasar rakyat Kota Madiun

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya pembinaan pengelola pasar rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.077.237.600	4.064.310.100	99,68%
J U M L A H								4.077.237.600	4.064.310.100	99,68%

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun
- Peran serta Pedagang ikut serta merawat atau memelihara fasilitas Pasar
- Kegiatan Propasih dan pengamanan terpadu ini melibatkan unsur masyarakat

- Faktor penghambat pencapaian kinerja :

- SDM yang ada perlu ditingkatkan kemampuan dan kualitasnya.
- Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :**
- Pembinaan SDM agar kemampuan dan kualitasnya meningkat

Madiun, Desember 2024
Subkoordinator Pengelolaan Sarana Prasarana
dan Ketertiban Pasar Rakyat


MISBAH HASANUN MUSTHOFA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19760513 201101 1 001

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tersedianya sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	100%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Periyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	492.513.313	486.553.604,91	98,79%
J U M L A H								492.513.313	486.553.605	98,79%

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Adanya anggaran APBD untuk penyediaan sarana distribusi perdagangan pasar rakyat
Adanya kerjasama yang baik dengan pedagang pasar untuk pengelolaan pasar

- Faktor penghambat pencapaian kinerja :

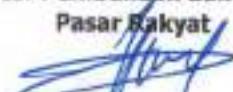
Kurangnya kesadaran Masyarakat baik pedagang maupun pembeli dalam ikut serta menjaga kebersihan pasar.

- Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

Sosialisasi dan pembinaan pedagang pasar rakyat Kota Madiun

Madiun, Desember 2024
Subkoordinator Pembukuan dan Pemberdayaan

Pasar Rakyat



HERLINA S. SE, MM

Pembina

NIP. 19690707 199703 2 010

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya perusahaan yang memperbarui perijinan	1. Prosentase Perusahaan yang memperbarui perijinan	100%	100%	100%	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	86.160.400	86.078.900	99,91%
2	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	2. Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	300.254.200	291.153.235	96,97%
3	Terwujudnya produk perdagangan yang dipromosikan	3. Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100%	100%	100%	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	337.278.650	335.563.110	99,49%
J U M L A H							723.693.250	712.795.245	98,49%

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Setiap program penyerapan dana dibagi dalam 4 triwulan sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Belum Optimalnya Distribusi Barang.
2. Belum Optimalnya pengetahuan masyarakat terkait perizinan berusaha secara online

Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

1. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
2. Melanjutkan program Warung Tekan Inflasi yang memberikan subsidi bahan pokok kepada masyarakat.
3. Secara masif melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha secara online.

Madiun, Desember 2024
Kepala Bidang Usaha Perdagangan



Dra. SITI NURZANAH

Pembina
NIP. 19680607 199303 2 003

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya Pembinaan PKL dan Pelaku Usaha Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	86.160.400	86.078.900	99,91%
J U M L A H								86.160.400	86.078.900	99,91%

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun

Madiun, Desember 2024

Subkoordinator Pengawasan Perizinan dan Pembinaan
Usaha Perdagangan



YUNI WIJAYANTO ST

Penata Muda Tingkat I

NIP. 197806102010011023

- Faktor penghambat pencapaian kinerja :

- Belum Optimalnya pengetahuan masyarakat terkait perizinan berusaha secara online

- Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

Sosialisasi dan pembinaan terkait perizinan berusaha secara online

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya pemantauan ketersediaan barang pokok dan penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100%	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	111.443.600	103.251.285	92,65%
2	Terlaksananya operasi pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	168.177.600	167.640.450	99,68%
3	Terlaksananya pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	2 Laporan	100%	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.633.000	20.261.500	98,20%
J U M L A H								300.254.200	291.153.235	96,97%

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Adanya anggaran APBD untuk pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun

- Faktor penghambat pencapaian kinerja :

- Belum Optimalnya Distribusi Barang dengan pihak eksternal (stakeholder).

- Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

1. Peningkatan koordinasi Distribusi Barang dengan pihak eksternal (stakeholder).
2. Melanjutkan program Warung Tekan Inflasi yang memberikan subsidi bahan pokok kepada masyarakat.

Madiun, Desember 2024
Subkoordinator Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting


TRI PRASETYANINGGRUM, SE, MM

Penata Tingkat I
NIP. 19810721 201101 2 007

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	8 UMKM	8 UMKM	100%	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	337.278.650	335.563.110	99,49%
J U M L A H								337.278.650	335.563.110	99,49%

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Adanya anggaran APBD untuk pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun

- Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Kurangnya koordinasi dan persiapan dalam pelaksanaan kegiatan

- Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

Peningkatan Koordinasi dan persiapan dalam pelaksanaan kegiatan

Madiun, Desember 2024
Subkoordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri



ANANG WIBOWO, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19611120 200901 1 009

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Persentase UTTP dan BDKT yang telah melakukari tera dan pengawasan BDKT	100%	100%	100%	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	224.674.843	221.500.900	98,59%
J U M L A H							224.674.843	221.500.900	98,59%

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Setiap program penyerapan dana dibagi dalam 4 triwulan sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait tertib ukur dan tera, tera ulang alat ukur.
2. Kurangnya petugas tera yang berhak memberi tanda tera yang sah.

Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

1. Jemput Bola Pelaksanaan Tera, Tera ulang dan Pengawasan Barang dalam Kemasan terbungkus pada lokasi lokasi strategis (pasar, warga masyarakat dll)
2. Meningkatkan Pelatihan atau diklat pada petugas tera dan pengawasan barang dalam kemasan terbungkus


 Madiun, Desember 2024
 Kepala UPTD Metrologi
TJATUR HERI SISWANTO, ST
 Penata Tingkat 1
 NIP. 19690702 199102 1 003

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	URAJAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasannya	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8186 Unit	8186 Unit	100%	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	217.342.843	214.208.900	98,56%
2	Terlaksananya Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	150 Orang	100%		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	7.332.000	7.292.000	99,45%
J U M L A H								224.674.843	221.500.900	98,59%

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun

- Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait tertib ukur dan tera, tera ulang alat ukur.
2. Kurangnya petugas tera yang berhak memberi tanda tera yang sah.

- Rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

1. Jemput Bola Pelaksanaan Tera, Tera ulang dan Pengawasan Barang dalam Kemasan terbungkus pada lokasi lokasi strategis (pasar, warga masyarakat dls)
2. Meningkatkan Pelatihan atau diklat pada petugas tera dan pengawasan barang dalam kemasan terbungkus

Mediun, Desember 2024
Kepala UPTD Metrologi Legal

TJATUR HERI SISWANTO, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19690702 199102 1 003

**DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN
2024**

PENGHARGAAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

Terinovatif 5
Anugrah Kompetisi Inovasi
Kota Madiun (KIAT) Tahun 2024



Juara Harapan I
Lomba Tertib Arsip di Lingkungan
Organisasi Perangkat Daerah
Kota Madiun

